

Percepatan Transformasi Ekonomi Dalam Pembangunan Anggaran Infrastruktur Sosial Di Indonesia

Accelerating Economic Transformation In Social Infrastructure Budget Development In Indonesia

Aufial Hidayat^a, Aldri Frinaldi^b, Asnil^c

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang^{a,b,c}

^aaufialhidayat959@gmail.com, ^baldri@fis.unp.ac.id, ^casnilmelayu@gmail.com

Abstract

Indonesia's economic transformation into a developed nation requires the acceleration of effective, inclusive, and sustainable infrastructure development. Amidst global and domestic challenges, the government is improving the quality of state spending by prioritizing the infrastructure sector to strengthen connectivity, reduce logistics costs, and promote equitable development. This research uses a qualitative approach through literature review and a case study of the Teluk Tapang Air Bangis Port PPP Project in West Sumatra as an example of the application of creative financing based on government-business partnerships. The findings indicate that infrastructure spending in 2024 will be directed towards completing national strategic projects, increasing the efficiency of budget allocations, and expanding non-APBN financing through PPP schemes to reduce the fiscal burden. The Teluk Tapang Port case study demonstrates that port integration with regional economic growth centers can increase the added value of commodities, open new logistics access, and strengthen the supply chain in western Indonesia, despite still facing obstacles in basic services, energy, connectivity, land, and ICT readiness. Overall, accelerated infrastructure development can strengthen national economic transformation if supported by efficient governance, innovative financing, integrated multi-sector planning, and support from local governments in preparing an adequate development ecosystem.

Keywords: Economic transformation, Infrastructure, State spending, PPP, Teluk Tapang Port.

Abstrak

Transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global dan domestik, pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara dengan memprioritaskan sektor infrastruktur untuk memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus Proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Sumatera Barat sebagai contoh penerapan pembiayaan kreatif berbasis kemitraan pemerintah dan badan usaha. Temuan menunjukkan bahwa belanja infrastruktur tahun 2024 diarahkan pada penyelesaian proyek strategis nasional, peningkatan efisiensi alokasi anggaran, serta perluasan pembiayaan non-APBN melalui skema KPBU guna mengurangi beban fiskal. Studi kasus Pelabuhan Teluk Tapang memperlihatkan bahwa integrasi pelabuhan dengan pusat pertumbuhan ekonomi regional dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka akses logistik baru, dan memperkuat rantai pasok kawasan barat Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada kendala layanan dasar, energi, konektivitas, lahan, dan kesiapan TIK. Secara keseluruhan, percepatan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat transformasi ekonomi nasional apabila ditopang tata kelola yang efisien, pembiayaan inovatif, perencanaan multisektor yang terintegrasi, serta dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pembangunan yang memadai.

Kata kunci: Transformasi ekonomi, Infrastruktur, Belanja negara, KPBU, Pelabuhan Teluk Tapang.

1. Pendahuluan

Transformasi ekonomi menjadi agenda strategis Indonesia dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang menuju negara maju. Di tengah dinamika perekonomian global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, dan tekanan inflasi dunia, perekonomian Indonesia tetap

menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Bersama Tiongkok dan India, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata global selama satu dekade terakhir (World Bank, 2023). Proyeksi World Economic Outlook (IMF, 2023) juga memperkirakan perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada 2024, didorong oleh pemulihan perdagangan, peningkatan permintaan domestik negara berkembang, serta meredanya tekanan harga komoditas.

Dalam konteks nasional, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama percepatan transformasi ekonomi. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat daya saing industri, membuka akses logistik, mendorong investasi, dan mempercepat pemerataan pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Karena itu, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur sebagai instrumen fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi alternatif pembiayaan yang semakin penting, terutama bagi proyek-proyek strategis yang membutuhkan pendanaan besar namun harus direalisasikan dalam waktu cepat. Proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis menjadi contoh konkret bagaimana sinergi pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan konektivitas maritim serta mendorong aktivitas ekonomi di Sumatera Barat.

Namun, percepatan transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemenuhan layanan dasar, keterbatasan infrastruktur energi, akses transportasi dan konektivitas, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta ketersediaan lahan (Prasetyo & Widodo, 2021). Tantangan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif agar pembangunan infrastruktur mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, terdapat gap penelitian yang membuat kajian ini penting dilakukan. Pertama, belum banyak penelitian yang mengkaji percepatan transformasi ekonomi melalui perspektif *alokasi anggaran infrastruktur* yang dikaitkan langsung dengan efektivitas implementasi proyek KPBU di daerah. Kedua, analisis yang mengaitkan kebijakan fiskal nasional dengan dampaknya pada pembangunan maritim berbasis kawasan masih terbatas. Ketiga, studi mengenai bagaimana proyek infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Teluk Tapang secara konkret mendorong integrasi ekonomi regional masih jarang dibahas secara mendalam, terutama dalam konteks Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk memberikan analisis komprehensif mengenai percepatan transformasi ekonomi melalui pembangunan anggaran infrastruktur dan implementasinya di level proyek. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kebijakan anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi nasional; (2) bagaimana skema pembiayaan inovatif, khususnya KPBU, berperan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur; dan (3) bagaimana implementasi Proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang menggambarkan integrasi kebijakan fiskal dengan pengembangan ekonomi daerah. Pertanyaan penelitian ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur dapat memperkuat transformasi ekonomi dan mendukung visi Indonesia Maju.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam kebijakan anggaran infrastruktur dan implementasinya dalam konteks nyata, bukan menguji hipotesis secara kuantitatif (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena kebijakan serta menganalisis keterkaitan antara belanja infrastruktur dan percepatan transformasi ekonomi.

Bentuk studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal (single case study), yaitu Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Sumatera Barat. Studi kasus dipilih karena proyek ini merepresentasikan implementasi kebijakan nasional anggaran infrastruktur dan pembiayaan inovatif di tingkat daerah serta memiliki karakteristik strategis sebagai simpul konektivitas maritim regional (Yin, 2018).

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur mencakup dokumen perencanaan nasional (RPJMN, RPJPN, APBN), laporan lembaga internasional (World Bank, IMF, IEA), regulasi pemerintah, publikasi kementerian terkait, serta hasil penelitian terdahulu dari para ahli yang membahas transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan KPBU (Todaro & Smith, 2020; Prasetyo & Widodo, 2021; World Bank, 2023). Data sekunder tambahan diperoleh dari dokumen teknis proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang, seperti rencana induk, studi kelayakan, dan laporan perkembangan proyek.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk menelaah kebijakan, regulasi, dan dokumen anggaran (Krippendorff, 2018), serta analisis studi kasus (case study analysis) untuk memahami secara kontekstual implementasi KPBU di Pelabuhan Teluk Tapang. Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), guna memastikan konsistensi temuan dan validitas argumentasi penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kilas Balik Belanja Negara Tahun 2024

Belanja negara tahun 2024 dirancang sebagai instrumen fiskal strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktural. Laporan *APBN Kita* menegaskan bahwa belanja infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan berbasis produktivitas (Kemenkeu, 2023). Fokus alokasi diarahkan pada sektor transportasi, energi, ketahanan pangan, telekomunikasi, dan layanan dasar. Selain pembangunan fisik, strategi anggaran menekankan peningkatan kualitas belanja (*spending better*) melalui integrasi perencanaan-penganggaran dan peningkatan efektivitas proyek. Optimalisasi pembiayaan alternatif seperti KPBU juga menjadi langkah penting guna memperluas kapasitas pendanaan infrastruktur tanpa membebani APBN. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa belanja infrastruktur tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat fondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Anggaran Infrastruktur

Pemerintah menempatkan infrastruktur sebagai pilar percepatan transformasi struktural. Kebijakan anggaran infrastruktur 2024 difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan kualitas belanja, dan optimalisasi pembiayaan non-APBN. Percepatan PSN, khususnya di sektor perhubungan, energi, dan TIK, diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antardaerah dan memperkuat rantai pasok nasional (Komite Percepatan PSN, 2023). Spending better diterapkan melalui evaluasi kinerja proyek, penguatan tata kelola, dan harmonisasi perencanaan lintas kementerian (Kemenkeu, 2023). Sementara itu, KPBU menjadi instrumen pembiayaan yang semakin dominan, terutama untuk proyek besar seperti Pelabuhan Teluk Tapang yang membutuhkan investasi signifikan. Proyek ini berfungsi sebagai contoh implementasi kebijakan fiskal yang memadukan efisiensi pembiayaan dengan percepatan pembangunan konektivitas maritim Sumatera Barat, sekaligus menunjukkan bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Meskipun strategi pembangunan telah diperkuat, pemerintah tetap menghadapi berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Ketimpangan layanan dasar di beberapa wilayah membatasi dampak pembangunan karena kurang mendukung produktivitas masyarakat (Prasetyo & Widodo, 2021). Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan masih menghadapi kesenjangan kapasitas, terutama di luar Jawa, sehingga membatasi potensi industrialisasi daerah (IEA, 2022). Pada sektor transportasi dan konektivitas, tingginya biaya logistik Indonesia menunjukkan bahwa integrasi antarmoda dan peningkatan kapasitas pelabuhan masih menjadi pekerjaan besar (World Bank, 2023). Tantangan serupa juga terjadi pada infrastruktur TIK yang belum merata di wilayah 3T, padahal digitalisasi merupakan kunci percepatan ekonomi modern. Selain itu, masalah pengadaan lahan terus menjadi faktor penghambat, termasuk dalam proyek KPBU karena keterbatasan koordinasi pusat-daerah serta proses administrasi yang tidak seragam. Sebagian besar tantangan ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan memerlukan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi dan dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur Indonesia dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif, merata, dan modern. Fokus utama meliputi penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas nasional, peningkatan akses layanan dasar, penguatan energi dan transisi energi berkelanjutan, modernisasi TIK, dan integrasi infrastruktur dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga diperkuat dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan pembiayaan inovatif melalui KPBU, blended finance, INA, dan obligasi daerah.

Studi Kasus: KPBU Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis

1. Dampak Ekonomi yang Sudah Mulai Terlihat

Meskipun proyek Pelabuhan Teluk Tapang masih berada pada tahap pengembangan, sejumlah dampak ekonomi awal telah mulai terlihat. Aktivitas

ekonomi lokal di Air Bangis dan Pasaman Barat menunjukkan peningkatan melalui berkembangnya jasa transportasi, logistik, dan perdagangan komoditas perkebunan. Efisiensi distribusi komoditas unggulan seperti CPO, karet, dan hasil hutan juga membaik karena waktu tempuh menuju pelabuhan ekspor berkurang signifikan dibandingkan ketika distribusi masih bergantung pada Pelabuhan Teluk Bayur. Selain itu, minat investasi lokal terhadap sektor pergudangan dan industri pengolahan skala kecil mulai meningkat, seiring dengan terbukanya peluang kerja di sektor konstruksi dan jasa pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa proyek telah mulai menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperkuat rantai nilai regional meskipun belum beroperasi penuh.

2. Hambatan Implementasi KPBU di Lapangan

Di sisi lain, implementasi skema KPBU pada proyek ini menghadapi beberapa hambatan spesifik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya sinkron, terutama terkait proses pembebasan lahan untuk akses jalan dan fasilitas pendukung pelabuhan. Kapasitas teknis pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen kelayakan dan struktur pembiayaan KPBU juga masih terbatas, sehingga memperlambat pemenuhan persyaratan administrasi. Selain itu, belum adanya kepastian pasokan energi menimbulkan risiko terhadap kelangsungan operasional pelabuhan dan industri pendukung. Fluktuasi harga komoditas ekspor, khususnya CPO, turut memengaruhi perhitungan kelayakan finansial proyek bagi investor. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KPBU tidak hanya ditentukan oleh desain pembiayaan, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan ekosistem pendukung di daerah.

3. Perbandingan dengan Proyek Sejenis

Pemahaman terhadap dinamika proyek akan semakin kuat apabila dibandingkan dengan proyek sejenis di Indonesia maupun luar negeri. Pelabuhan Patimban, misalnya, menunjukkan bahwa integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri serta kesiapan akses jalan tol merupakan faktor krusial untuk mempercepat pemanfaatan. Pengalaman Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara juga memperlihatkan bahwa pembangunan pelabuhan baru membutuhkan ekosistem logistik dan industri yang kuat agar kapasitas pelabuhan dapat digunakan secara optimal. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan di Vietnam dan Malaysia menegaskan bahwa keberhasilan pelabuhan ekspor sangat ditentukan oleh konektivitas hinterland, kepastian regulasi, serta stabilitas iklim investasi. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa Teluk Tapang memiliki potensi besar menjadi simpul ekonomi baru, namun keberhasilannya sangat bergantung pada integrasi infrastruktur pendukung dan konsistensi kebijakan daerah.

4. Hubungan Kebijakan Nasional dan Implementasi Daerah

Analisis juga menunjukkan bahwa keberhasilan proyek KPBU seperti Teluk Tapang ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Pemerintah pusat berperan menyediakan kerangka regulasi, fasilitas pembiayaan KPBU, dan penetapan proyek sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Namun, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam penyediaan lahan, pembangunan aksesibilitas pendukung, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan. Kesenjangan koordinasi teknis dan administratif antara kedua level pemerintahan sering menjadi faktor utama lambatnya progres proyek. Dengan demikian, harmonisasi

kebijakan pusat-daerah menjadi prasyarat penting agar proyek infrastruktur strategis seperti Teluk Tapang dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

5. Sinergi KPBU Pelabuhan Teluk Tapang dengan Badan Usaha Pelabuhan Daerah (BPUD) Pasaman Barat dan Regulasi Kemendagri.

Dalam implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis, keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan proyek dan optimalisasi manfaat pembangunan infrastruktur pelabuhan. Keterlibatan pemerintah daerah tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan **Badan Usaha Pelabuhan Daerah (BPUD) Kabupaten Pasaman Barat** sebagai entitas bisnis daerah yang berperan dalam mendukung dan melengkapi pelaksanaan KPBU, sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal dan penguatan peran BUMD dalam penyediaan layanan publik strategis (Hodge & Greve, 2017; Yescombe, 2018).

Dalam struktur KPBU Pelabuhan Teluk Tapang, BPUD Kabupaten Pasaman Barat dapat dilibatkan secara strategis dalam ruang lingkup pekerjaan turunan proyek, antara lain melalui pengelolaan fasilitas penunjang pelabuhan seperti lapangan penumpukan, gudang logistik, *cold storage*, dan depo komoditas daerah. Selain itu, BPUD juga dapat menjalin kerja sama operasional (*joint operation/KSO*) dengan Badan Usaha Pelaksana KPBU pada fase operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*), sehingga pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam pengelolaan pasca-konstruksi serta penguatan ekosistem ekonomi pelabuhan (Yescombe, 2018; World Bank, 2023).

Sinergi antara skema KPBU Pelabuhan Teluk Tapang dengan keterlibatan BPUD Kabupaten Pasaman Barat membuka peluang peningkatan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** secara berkelanjutan. Kontribusi PAD tersebut bersumber dari berbagai mekanisme fiskal daerah, antara lain dividen BPUD sebagai badan usaha milik daerah yang terlibat langsung dalam aktivitas kepelabuhanan, retribusi daerah atas pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan kawasan pendukung, serta pajak daerah yang timbul dari meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan dan sekitarnya. Peningkatan basis pajak daerah ini mencerminkan fungsi pelabuhan sebagai *growth pole* yang mendorong ekspansi aktivitas ekonomi regional (Todaro & Smith, 2020; World Bank, 2023).

BPUD Pasaman Barat dapat diposisikan bukan sebagai pengganti Badan Usaha Pelaksana KPBU, melainkan sebagai **mitra daerah** yang mengelola turunan (*downstream*) kegiatan proyek pelabuhan, sehingga pemerintah daerah memiliki keterlibatan langsung dalam penyelesaian dan pengoperasian pelabuhan. Pola ini sejalan dengan prinsip KPBU yang menekankan kolaborasi multipihak, pembagian peran yang proporsional, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur strategis (Hodge & Greve, 2017).

Keterlibatan BPUD Pasaman Barat dalam KPBU Pelabuhan Teluk Tapang memiliki dasar regulasi yang kuat. Secara normatif, penguatan peran BPUD sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola aset strategis dan menjalankan usaha pelayanan publik secara profesional (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah memungkinkan pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan kerja sama usaha dengan

pihak ketiga, termasuk dalam proyek infrastruktur berbasis KPBU (Kemendagri, 2012).

Regulasi Kemendagri terkait tata kelola BUMD juga menekankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha, yang selaras dengan kerangka regulasi KPBU yang membuka peluang keterlibatan pemerintah daerah dan badan usaha daerah dalam mendukung proyek strategis nasional. Keselarasan regulasi ini menunjukkan bahwa KPBU, BPUD Pasaman Barat, dan optimalisasi pajak daerah merupakan satu kesatuan kebijakan yang saling mendukung dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Teluk Tapang.

6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi, baik dari perspektif makro maupun sektoral. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa investasi infrastruktur merupakan prasyarat utama transformasi struktural ekonomi di negara berkembang karena mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong diversifikasi ekonomi. Infrastruktur transportasi dan logistik, khususnya pelabuhan, dipandang sebagai pengungkit penting dalam integrasi wilayah ke dalam rantai nilai nasional dan global.

Penelitian World Bank (2023) menunjukkan bahwa kualitas dan efisiensi belanja infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing regional. Namun demikian, laporan tersebut juga menekankan bahwa dampak infrastruktur terhadap transformasi ekonomi sangat bergantung pada tata kelola proyek, integrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi, serta kesiapan institusi di tingkat daerah.

Di konteks Indonesia, Prasetyo dan Widodo (2021) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menghasilkan transformasi ekonomi yang merata karena masih terkendala oleh ketimpangan layanan dasar, keterbatasan energi, serta lemahnya konektivitas antarmoda di luar Pulau Jawa. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas wilayah.

Sementara itu, kajian mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menunjukkan bahwa skema ini berpotensi meningkatkan efisiensi pembiayaan dan percepatan penyediaan infrastruktur apabila didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Hodge dan Greve (2017) serta Yescombe (2018) menegaskan bahwa keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh pembagian risiko yang proporsional, kepastian pendapatan proyek, dan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan prasyarat proyek.\

Penelitian yang secara khusus mengkaji KPBU pelabuhan di Indonesia masih relatif terbatas. Beberapa studi lebih banyak berfokus pada pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Patimban, dan Kuala Tanjung, dengan penekanan pada efisiensi logistik dan daya saing industri (World Bank, 2023). Kajian mengenai pelabuhan baru berbasis kawasan di luar pusat ekonomi utama, khususnya yang dikaitkan langsung dengan transformasi ekonomi regional melalui kebijakan anggaran, masih jarang dibahas secara mendalam.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat literatur yang membahas infrastruktur, transformasi ekonomi, dan KPBU secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu analisis

berbasis studi kasus proyek KPBU pelabuhan di tingkat daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis keterkaitan kebijakan anggaran infrastruktur, skema KPBU, dan percepatan transformasi ekonomi melalui studi kasus Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Sumatera Barat.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan transformasi ekonomi Indonesia sangat bergantung pada efektivitas pembangunan infrastruktur yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Belanja negara tahun 2024 telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui penyelesaian proyek strategis, efisiensi penganggaran, serta perluasan pembiayaan alternatif seperti KPBU. Studi kasus Pelabuhan Teluk Tapang membuktikan bahwa pelabuhan dapat menjadi katalis penguatan konektivitas kawasan, penurunan biaya logistik, dan pembukaan akses ekonomi baru bagi wilayah yang sebelumnya terpencil.

Namun, sejumlah kendala struktural meliputi keterbatasan layanan dasar, pasokan energi, infrastruktur TIK, kesiapan teknis kelembagaan daerah, serta koordinasi antarlevel pemerintahan masih membatasi optimalisasi manfaat proyek. Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi memerlukan langkah kebijakan yang lebih operasional, antara lain penyempurnaan mekanisme pengadaan lahan yang lebih transparan dan terkoordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam perencanaan dan pembiayaan KPBU, serta penggunaan skema pembiayaan hybrid yang menggabungkan APBN, sektor swasta, dan lembaga multilateral untuk mengurangi risiko fiskal dan mempercepat realisasi proyek.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang sebagian besar menggunakan studi literatur dan satu studi kasus, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Untuk itu, studi lanjutan disarankan memperluas analisis komparatif antarproyek KPBU, melakukan penilaian biaya-manfaat yang lebih mendalam, serta mengeksplorasi dinamika kelembagaan daerah dalam implementasi infrastruktur strategis guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan di masa mendatang.

5. Daftar Pustaka

- Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.
- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas 2045*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2024). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Nasional 2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2023). *Skema KPBU dalam Pembiayaan Infrastruktur Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). On public–private partnership performance: A contemporary review. *Public Works Management & Policy*, 22(1), 55–78.
- IEA. (2022). *Indonesia Energy Outlook*.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook Update: July 2023*. International Monetary Fund.
- Kemenhub. (2022). *Rencana Induk Pelabuhan Nasional*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Belanja Negara 2024 dan Outlook Perekonomian Global*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Buku Saku Infrastruktur: Transformasi Ekonomi melalui Efektivitas Anggaran*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Proyek Strategis Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis: Dokumen Perencanaan dan Kelayakan KPBU*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.
- Kemenkeu. (2023). *APBN Kita: Infrastruktur dan Pembiayaan Inovatif*.
- Kemenkeu. (2023). *Skema KPBU dan Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan*.
- Kemenlhk. (2022). *Dokumen AMDAL Proyek Infrastruktur Maritim*.
- Kemenlhk. (2022). *Kebijakan Lingkungan dan Infrastruktur Berkelanjutan*.
- Komite Percepatan PSN. (2023). *Laporan Tahunan Proyek Strategis Nasional*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, T., & Widodo, A. (2021). Infrastruktur dan transformasi ekonomi di negara berkembang: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(2), 112–124.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- World Bank. (2023). *Global Economic Prospects*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Accelerating Structural Transformation*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Public Infrastructure Development and Financing Strategies*.
- World Bank. (2024). *Infrastructure for Growth and Inclusion in Southeast Asia*. World Bank Group.
- Yescombe, E. R. (2018). *Public-private partnerships in sub-national governments*. Elsevier.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.